

# “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM UPAYA KETAHANAN NASIONAL”

Angel Damayanti  
angel.damayanti@uki.ac.id

## Abstract

Men and women are physically different. Most importantly, they also have different roles in a family. Nonetheless, this paper shows how men and women have similar rights and obligations to protect their country. As a threat perception is changing in the last decade, both men and women have responsibilities to secure the national interests. This is true according to the 1945 Indonesian Constitution. Both of them are the reserve components of the nation power without gender separation. However, there is one condition to fulfill women's role in national resilience. This is to mention the intelligence that should be developed by Indonesian women. By having this multiple intelligence Indonesian women will know their role and furthermore will perform their role in family, society and the country. To support this argument, the paper will conduct content analysis methodology towards 1945 Indonesian Constitution (UUD 1945), coupled with other supporting opinion and written documents.

*Keywords : National resilience, threat perception, intelligent quotients, role of women.*

Laki-laki dan perempuan secara fisik jelas berbeda. Bahkan, mereka juga memiliki peranan yang berbeda dalam keluarga. Namun, paper ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melindungi negara mereka. Selain itu, terkait dengan perubahan persepsi ancaman, baik laki-laki maupun perempuan punya tanggung jawab yang sama dalam melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, keduanya merupakan komponen cadangan dalam kekuatan nasional tanpa ada pembedaan jenis kelamin. Namun, ada satu kondisi yang harus dipenuhi agar perempuan Indonesia dapat terlibat dalam upaya ketahanan nasional dan bela negara, yaitu para perempuan Indonesia harus memiliki dan dapat mengembangkan kecerdasan yang pada diri mereka. Kecerdasan ini diperlukan agar para perempuan memahami peranan mereka dan mengetahui bagaimana menjalankan peranan tersebut di dalam keluarga, lingkungan masyarakat serta bangsa dan negara. Untuk mendukung argumentasi ini, penulis menggunakan analisa isi terhadap UUD 1945, yang dilengkapi juga dengan berbagai opini dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

*Keywords : Ketahanan nasional, persepsi ancaman, kecerdasan, peranan perempuan.*

## Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki memang terlahir berbeda secara fisik. Di samping itu, mereka memiliki peranan yang juga berbeda di dalam keluarga. Seorang perempuan yang telah menikah sejatinya akan menjadi seorang ibu yang hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anaknya. Di sisi lain, seorang laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga, harus bekerja,

bertanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya, serta menjadi imam dan kepala keluarga yang mengarahkan dan membimbing keluarganya. Ini menunjukkan, seorang ayah bukan saja bertugas untuk mendidik anak-anaknya, tetapi lebih dari itu, ia juga bertanggung jawab terhadap masa depan keluarganya.

Perbedaan secara fisik serta fungsi perempuan dan laki-laki di dalam keluarga menimbulkan pertanyaan lainnya. Apakah peranan perempuan dan laki-laki juga berbeda di dalam masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara? Pertanyaan inilah yang akan dijawab di dalam makalah ini. Paper ini berargumentasi bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peranan yang sama pentingnya dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Untuk itu, paper ini menyarankan pentingnya memiliki kecerdasan bagi seorang perempuan. Dengan demikian ia dapat mengetahui perannya dan merealisasikan peranannya dalam upaya pertahanan dan keamanan di dalam kehidupan keluarga, lingkungan dan masyarakat serta bangsa dan negara.

Pemikiran ini berangkat dari isi Konstitusi Negara Indonesia, UUD 1945 (yang telah diamandemen) yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27, ayat 3) dan dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 30, ayat 1). Kedua pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai argumentasi tersebut di atas, paper ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai konsepsi ketahanan nasional Indonesia dan persepsi ancaman yang berkembang saat ini. Bagian ini akan menjelaskan juga ancaman-ancaman yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Bagian kedua akan menjelaskan tentang konsep bela negara dan sistem pertahanan keamanan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan tertulis secara resmi di dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bagian ketiga akan membahas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam upaya ketahanan nasional. Pada bagian akhir, paper ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan mengenai peran yang bisa diambil oleh perempuan di Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

## **Konsepsi Ketahanan Nasional dan Persepsi Ancaman**

Ketahanan Nasional saat ini menjadi sebuah tanggung jawab penting terutama bagi pemerintah di dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan Negara Indonesia. Hal ini mencakup masalah kedaulatan dan keamanan nasional, keutuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Pemerintah Indonesia mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.<sup>i</sup> Tujuan nasional bangsa Indonesia, secara jelas tercatat di dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>ii</sup>

Dari definisi ini, dapat kita lihat beberapa poin penting terkait dengan ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional menggambarkan kondisi suatu bangsa yang dinamis, berubah-ubah, dan tidak selalu sama setiap saat. Dinamika ini tentu saja terjadi karena segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita selalu berubah. Keadaan seorang manusia termasuk kita sendiri pun pasti mengalami perubahan, apalagi kondisi suatu negara yang mencakup sejumlah manusia yang tinggal di dalamnya.

Perubahan ini bisa juga terjadi karena adanya dorongan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya perubahan kondisi suatu bangsa berasal dari unsur-unsur di dalam negara tersebut, misalnya penambahan jumlah penduduk, pergantian rezim politik yang berkuasa dan gejala alam yang terjadi di dalam wilayah negara itu. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal bisa terjadi karena adanya pengaruh dari luar seperti masuknya pengaruh asing dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta dampak dari dinamika hubungan internasional.

Namun demikian, kondisi dinamis suatu bangsa tidak melulu berdampak negatif. Poin kedua dari konsep ketahanan nasional mencatat bahwa dinamika yang terjadi di dalam suatu negara dapat mendorong keuletan dan ketangguhan serta mengembangkan kemampuan untuk membangun kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Ini berarti, meskipun kondisi suatu negara bisa berubah dan bentuk ancamanpun berubah mengikuti perkembangan zaman, namun perubahan itu bisa mengarah kepada sebuah perkembangan positif. Mengapa? Karena perubahan itu mampu mendorong munculnya sikap mental yang

mau terus berusaha, pantang menyerah serta tangguh dari seluruh komponen bangsa. Sikap seperti ini jelas diperlukan dalam membangun kekuatan nasional dan untuk menghadapi setiap ancaman yang ada.

Ilmu Psikologi menjelaskan bagaimana daya tahan seseorang menghadapi masalah atau ancaman berkaitan erat dengan pikiran dan persepsi seseorang.<sup>iii</sup> Artinya, jika seseorang berpikir bahwa ia mampu menghadapi segala bentuk ancaman, maka ia akan sanggup mengatasinya. Sebaliknya jika seseorang berpikir bahwa ia tidak mampu menghadapi suatu masalah, maka ia tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, pola pikir seseorang akan menentukan apakah seseorang dapat mengatasi masalah yang ia hadapi atau tidak. Kondisi yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang tinggal di dalam wilayah suatu negara. Jika mereka memiliki persepsi bahwa mereka mampu mengatasi sebuah masalah atau menghadapi ancaman, maka bangsa tersebut akan sanggup menghadapinya. Sebaliknya, jika mereka berpikir mereka tidak mampu mengatasi dan menghadapi ancaman yang ada, maka mereka tidak akan berhasil.

Yang ketiga, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketahanan nasional mengandung arti kemampuan untuk mengatasi ancaman terhadap integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengartikan ancaman sebagai setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.<sup>iv</sup>

Dari penjelasan UU no. 17/2011 tersebut maka dapat dikatakan bahwa ancaman dapat berasal dari dalam negeri, dari luar atau bahkan gabungan keduanya seperti dalam kasus terorisme di Indonesia. Ancaman dari luar jelas berasal dari kemungkinan adanya serangan militer dari negara lain. Hal itu terjadi misalnya dengan meningkatnya anggaran belanja militer China 11.7 – 20.3 persen setiap tahunnya sejak tahun 1998.<sup>v</sup> Meskipun pemerintah China mengatakan bahwa peningkatan anggaran militer mereka telah disesuaikan dengan peningkatan perekonomian mereka, namun kenaikan belanja militer ini membuat negara-negara di sekitar China dan di kawasan Asia Pasifik menjadi khawatir. Kekhawatiran mereka beralasan karena peningkatan anggaran militer mereka bukan saja digunakan untuk

membiayai personil *People's Liberation Army* (PLA) tetapi juga untuk memodernisasi persenjataan mereka.

Akibat dari meningkatnya kekuatan militer China ini tentu saja mendorong munculnya kebijakan serupa dari negara-negara tetangganya, khususnya negara-negara yang sedang memiliki konflik perbatasan, perebutan wilayah perairan dan masalah politik dengan China. Hal ini tergambar misalnya dalam kasus perebutan Laut China Timur dengan Jepang, kebijakan represif terhadap Taiwan yang menimbulkan ketegangan dengan Amerika Serikat, serta klaim terhadap Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selain itu, kebijakan pemerintah China untuk terus meningkatkan kekuatan pertahanannya, terutama angkatan lautnya mengundang datangnya kekuatan lain seperti Amerika Serikat (AS) untuk berperan lebih banyak di kawasan Asia Pasifik. Presiden Barack Obama pada tahun 2011 lalu, bahkan telah menyetujui pembangunan pangkalan militer AS dan pengiriman 2500 marinir secara bertahap di Darwin, Australia.<sup>vi</sup> Pangkalan ini jelas menambah jumlah pangkalan militer AS yang sebelumnya sudah ada di Jepang, Filipina dan Korea Selatan.

Kelompok realis percaya bahwa penempatan pangkalan militer asing di wilayah tertentu bisa berdampak positif. Aliansi dengan negara lain yang lebih kuat dirasakan perlu dalam hal mengimbangi kekuatan suatu negara di kawasan tertentu. Terutama jika negara tersebut terlihat mendominasi kawasan melalui kebijakan pertahanannya.<sup>vii</sup> Namun, masuknya kekuatan AS di Asia Pasifik juga bisa menimbulkan ancaman tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Kondisi tersebut dirasa mengancam negara-negara yang sangat menghormati konsep kedaulatan, dan mereka yang tidak tergabung dalam aliansi yang dibuat oleh AS.

Selanjutnya, jika ancaman itu berasal dari dalam, maka kemungkinan besar ancaman tersebut berasal dari salah satu atau gabungan unsur dari bangsa itu sendiri. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa elemen suatu negara itu mencakup wilayah dengan segala kondisi geografis yang ada, penduduk yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut serta pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan.<sup>viii</sup> Dengan demikian, ancaman internal terhadap suatu negara bisa berasal dari kondisi geografis di negaranya, penduduknya atau bahkan pemerintah yang lalai dan tidak mampu untuk melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan.

Jumlah penduduk Indonesia yang melebihi 230 juta<sup>x</sup> jiwa bisa menjadi sebuah keuntungan sekaligus ancaman. Jumlah penduduk yang besar dari suatu negara akan menjadi sebuah kekuatan jika sumber daya manusia di negara tersebut memiliki karakter, keahlian dan daya saing yang tinggi. Namun, kondisi ini akan menjadi masalah jika yang terjadi adalah sebaliknya. Sumber daya manusia yang tidak berakhlak mulia, berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian hanya akan menjadi beban bagi suatu negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang besar merupakan pertanda akan kebutuhan terhadap lahan dan sumber daya alam yang besar. Tanpa adanya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dapat dipastikan kondisi tersebut hanya akan membahayakan negara Indonesia sendiri.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di atas sabuk vulkanis yang memanjang dari Sumatra hingga Maluku dan disertai pengaruh *global warming*, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana.<sup>x</sup> Tsunami, gempa tektonik dan vulkanik serta longsor adalah bagian dari pemandangan yang kita lihat terjadi di Negara ini. Bencana ini menjadi masalah yang semakin besar ketika pemerintah abai dan tidak mampu melakukan tindakan pencegahan serta lamban memberikan pertolongan setelah terjadinya bencana. Ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi di Negara ini tentu saja akan menambah panjang daftar masalah di negara ini.

Di samping itu, perubahan cuaca secara global, kekeringan atau bahkan sebaliknya curah hujan yang ekstrim dapat mempengaruhi produksi pangan di negara ini. Gagal panen akibat kekeringan, banjir dan serangan hama menjadi penyebab atas terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini jelas membuat Negara Indonesia rentan mengalami bahaya kelaparan serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin baik di desa maupun di kota. Badan Pusat Statistik mencatat, meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2007, namun di tahun 2012 jumlah tersebut masih melebihi angka 10%.<sup>xi</sup>

Di sisi lain, terorisme telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti karena sejak akhir tahun 1990an negara Indonesia telah menjadi korban dari tindakan kejam para teroris. Tercatat lebih dari 30 aksi pemboman yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia.<sup>xii</sup> Kerugian yang dialami oleh Indonesia bukan saja bersifat material dan finansial, namun lebih dari itu. Ratusan orang tidak berdo'a turut menjadi korban dan keamanan negara ini terus menerus berada dalam situasi rawan. Akibatnya, kepercayaan

negara lain terhadap kemampuan pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan ketertiban di dalam negerinya sendiri menjadi turun. Hal ini jelas akan berdampak negatif terhadap investasi, bisnis pariwisata dan perhotelan serta nama baik pemerintah itu sendiri.

Meskipun aksi terorisme di Indonesia kerap dikaitkan dengan organisasi Jemaah Islamiyah Indonesia, yang merupakan sempalan dari kelompok Darul Islam (DI) di Indonesia, namun sesungguhnya ideologi para pelaku teror itu didapat dari luar. Para pelaku teror di Indonesia seperti Mukhlas, Amrozi, dan Imam Samudera dipengaruhi doktrin kekerasan ‘jihad’ setelah mereka memperoleh pelatihan di kamp pejuang Mujahidin di Afganistan.<sup>xiii</sup> Itu sebabnya, banyak pengamat terorisme mengaitkan terorisme di Indonesia dengan ancaman terorisme internasional dan kejahatan transnasional<sup>xiv</sup> Pelakunya bisa saja berasal dari warga negara Indonesia, namun ideologi, pelatihan serta dukungan dana dan senjatanya diperoleh dari negara lain.

### **Upaya Bela Negara Indonesia**

Setiap negara tentu memiliki kebijakan masing-masing dalam menjaga dan mempertahankan keamanan nasionalnya. Pemerintah Singapura misalnya, memperkenalkan konsep keterlibatan seluruh lapisan masyarakat di negaranya untuk menjaga ketahanan nasional negara mereka pada tahun 2006. Konsep ketahanan ini dikenal dengan nama *Community Engagement Programme (CEP)*.<sup>xv</sup> Program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Singapura setelah terjadi Bom London pada tanggal 7 Juli 2005 yang menyerang sistem transportasi di Inggris. Munculnya teroris yang berasal dari generasi kedua kaum imigran yang telah menetap sekian lama di Inggris, membuat pemerintah Singapura merasa perlu menyikapi keragaman ras yang ada di dalam negerinya. Kebijakan untuk melibatkan seluruh masyarakat Singapura yang sangat beragam disebabkan terutama karena adanya kekhawatiran akan munculnya *home-grown terrorists*<sup>xvi</sup> serta tumbuhnya kebencian terhadap umat Islam akibat serangan Al Qaeda dan afiliasinya di berbagai negara.

Sama seperti pemerintah Singapura, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah memiliki konsep serupa sejak masa Orde Baru. Meskipun dengan persepsi tentang ancaman yang agak berbeda, mantan Presiden Soeharto pernah memperkenalkan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) sebagai doktrin militer Negara Indonesia. Dengan sistem ini, pemerintah memasukkan semua elemen, baik militer maupun sipil untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Sistem ini sempat memudar bersamaan dengan

munculnya era reformasi yang menuntut penguatan peran sipil dan pengurangan dominasi tentara di bidang sosial politik. Namun, sejalan dengan bertambahnya intensitas ancaman, baik secara kualitas maupun kuantitas, UUD Negara Indonesia Tahun 1945 (yang telah diamandemen) kembali secara tegas menyebutkan bahwa untuk menjaga ketahanan nasional Negara Indonesia, pemerintah perlu melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kekuatan militer, polisi dan masyarakat sipil.

Secara lengkap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah diamandemen) menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 27 (3)

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Pasal 30 (1)

Pasal 27 (3) ini menegaskan konsep pembelaan negara yang dianut oleh bangsa dan Negara Indonesia. Bagi Indonesia, upaya pembelaan Negara bukan hanya monopoli Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Sebagai bentuk implementasi dari upaya bela Negara tersebut, UUD 1945 kemudian juga menambahkan di dalam Pasal 30 (1) tentang usaha pertahanan dan keamanan negara yang juga merupakan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia perlu dilibatkan? Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Indonesia mendasarkan konsep bela negara pada pemikiran bahwa sistem pertahanan dan keamanan Negara Indonesia adalah melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini jelas tertulis dalam UUD 1945 (yang telah diamandemen) pasal 30 (2):

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Dengan adanya pasal ini di dalam Konstitusi Negara Indonesia, maka tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk tidak terlibat dalam upaya pembelaan dan usaha pertahanan keamanan Negara. Hal itu merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga Negara Indonesia. Upaya bela Negara ini menjadi hak setiap warga Negara karena bumi Indonesia adalah seumpama rumah mereka dan milik mereka sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih berhak melakukan tindakan pengamanan apapun terhadap suatu rumah selain daripada pemiliknya

sendiri. Oleh karena itu, 'rumah Indonesia' ini wajib dijaga keamanannya setiap saat dari ancaman bentuk apapun. Selanjutnya, untuk menjelaskan siapa saja yang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 26 ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta memang menegaskan perlunya keterlibatan setiap warga Negara Indonesia, namun demikian ada pembedaan tugas dan fungsi di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah tetap memberdayakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai kekuatan utama di dalam upaya pertahanan dan keamanan Negara. Posisi rakyat dalam hal ini adalah sebagai komponen kekuatan yang mendukung TNI dan POLRI terutama dalam upaya-upaya menghadapi ancaman terhadap Negara Indonesia. Mengenai pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab antara TNI dan POLRI, serta pelibatan rakyat di dalam upaya pertahanan keamanan Negara, pemerintah telah mengajukan draft RUU tentang Keamanan Nasional (Kamnas). Hingga saat paper ini dibuat, RUU tersebut masih sedang terus dibahas antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

### **Peranan Perempuan dalam Ketahanan Nasional**

Berlandaskan konsepsi bela negara serta landasan hukumnya di Indonesia dan sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, perempuan Indonesia pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di dalam upaya ketahanan nasional. Tampaknya perjuangan RA Kartini yaitu agar perempuan Indonesia memiliki kesetaraan dengan laki-laki di Indonesia telah diakomodir dengan baik dalam Konsitusi Negara. Saat itu, Kartini hanya berharap agar perempuan Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Namun, saat ini pemerintah Indonesia telah memperluas kesempatan kesetaraan itu dan menuliskannya dalam landasan hukum tertinggi di Negara ini, yaitu UUD 1945. Kesetaraan laki-laki dan perempuan berlaku bukan hanya untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga dalam hal kedudukan di dalam hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama yang diakui oleh pemerintah serta menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, juga di dalam upaya pertahanan dan keamanan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek kehidupan bermasyarakat, masih terdapat pembedaan stereotype antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan antara lain karena

masih kuatnya penghormatan terhadap tradisi dan budaya di dalam hidup bermasyarakat yang seringkali menempatkan perempuan sebagai warga masyarakat kelas dua. Berbeda dengan stereotype yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, justru menyebutkan bahwa Ketahanan Nasional tidak mengenal perbedaan jender, terutama di dalam upaya menciptakan kondisi ideal untuk pembangunan bangsa. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, justru kaum perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan mendasar bagi terwujudnya kualitas watak dan karakter bangsa.<sup>xvii</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh Budi Susilo ini, jelas bahwa perempuan bukan saja bertanggung jawab dalam Ketahanan Nasional dan pembangunan bangsa tetapi juga ikut menentukan kualitas watak dan karakter bangsa. Hal ini dapat dipahami karena kualitas seorang Ibu akan sangat mempengaruhi kualitas anak-anak yang dilahirkannya. Lebih jauh lagi, kualitas anak-anak akan sangat mempengaruhi kualitas bangsa dan negara, mengingat anak-anak tersebut akan menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dalam memajukan negara Indonesia.

Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, perempuan Indonesia harus cerdas.<sup>xviii</sup> Menurutnya, kecerdasan ini diperlukan agar para perempuan tahu hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan. Hal ini tentu saja termasuk keterlibatan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kondisi ideal bagi pembangunan nasional. Mengenai kecerdasan, Howard Gardner dalam bukunya *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences as A Model of Intelligence*, menyebutkan ada sedikitnya 8 (delapan) macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia.<sup>xix</sup>

Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasarn ini mencakup kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang memiliki kecerdasan linguistik akan memiliki kemampuan untuk bukan saja mendengar dan memahami kata-kata, tetapi juga untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi kondisi pikiran orang lain. Dalam hal ketahanan nasional, para perempuan yang memiliki kecerdasan linguistik akan mampu menyampaikan informasi dan menggerakkan orang lain mengikuti informasi yang mereka berikan. Dengan kecerdasan ini, mereka dapat dijadikan sebagai kader untuk memberikan penyuluhan dan diseminasi

informasi kepada masyarakat di sekitarnya mengenai ancaman, keamanan lingkungan dan dalam lingkup yang lebih luas lagi, ketahanan nasional.

Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah. Kemampuan ini umumnya melibatkan keterampilan untuk mengolah angka dan berpikir secara logis. Seseorang dengan kecerdasan logis mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan menggunakan logika atau akal sehat dan bukan sekedar menggunakan emosi atau perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini juga bermanfaat untuk membuat laporan keuangan dan menganalisa sebuah laporan. Sistem ketahanan nasional Indonesia membutuhkan para perempuan yang memiliki kecerdasan logis matematis untuk dapat menyaring setiap pengaruh asing yang masuk ke Negara ini. Keterampilan ini penting agar perempuan Indonesia dapat mencegah generasi muda dipengaruhi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional hanya karena luapan emosi dan perasaan.

Kecerdasan ketiga meliputi kecerdasan visual dan spasial, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala secara akurat dan cermat. Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini misalnya penting pada saat menghias rumah, merancang taman, menggambar, melukis dan menikmati sebuah karya seni.

Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetik, yang meliputi kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dan olahraga dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan. Kecerdasan kinestetik akan membuat perempuan Indonesia tetap sehat. Kesehatan yang prima akan akan memungkinkan para perempuan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan serta dalam upaya menjaga keamanan lingkungan dan nasional.

Kecerdasan yang kelima menyangkut kecerdasan di bidang musik. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi dan timbre dari musik yang didengar. Dalam keseharian, kita mendapat manfaat dari kecerdasan ini dalam banyak hal, misalnya saat menyanyi, memainkan alat musik, dan menikmati musik.

Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk mudah memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Sebagian orang menyebut kecerdasan ini sebagai kemampuan berempati. Dalam kehidupan sehari-hari baik itu di dalam keluarga, lingkungan maupun pekerjaan, kecerdasan ini dinilai mutlak diperlukan - bahkan seringkali disebut sebagai kunci kesuksesan hidup.

Di dalam ketahanan nasional, kecerdasan ini menjadi penting terutama karena mencakup kemampuan untuk bergaul dengan orang-orang yang berada di dalam satu lingkungan serta mengenali keadaan orang-orang di sekitarnya. Para perempuan yang memiliki kecerdasan interpersonal ini juga sangat dibutuhkan untuk secara tanggap mengamati perubahan yang terjadi dalam lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, ancaman terhadap lingkungan masyarakat atau bangsa dan Negara dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah kemungkinan terjadinya.

Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan pengetahuan tentang "siapa diri saya". Orang yang memiliki kecerdasan seperti ini dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri, sehingga dapat menjadi teladan bagi keluarganya dan orang lain. Dengan memiliki kecerdasan ini, para perempuan diharapkan dapat menjadi teladan dan memberikan contoh bagi orang lain, terutama dalam menjaga keamanan di dalam keluarga, lingkungan dan nasional.

Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis yang berupa kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya, kecerdasan ini mencakup kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan dan bagian lain dari alam semesta. Kecerdasan ini akan membuat para perempuan memiliki kecintaan terhadap lingkungan mereka dan kesadaran untuk menjaga lingkungan di sekitar mereka dengan sebaik-baiknya, termasuk kecintaan terhadap tanah air dan bumi Indonesia.

Dari penjelasan tentang 8 (delapan) macam kecerdasan di atas, tampak bahwa kecerdasan tidak selalu identik dengan tingkat pendidikan seseorang. Namun demikian, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menunjang kecerdasan. Seorang perempuan bisa memiliki kecerdasan tersebut di atas dengan adanya potensi dan talenta yang

dimilikinya sejak lahir. Namun, tidak cukup sampai di sana, potensi dan talenta tersebut perlu dikembangkan baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Untuk itu, agar dapat berperan dalam ketahanan nasional dan upaya bela Negara, perempuan Indonesia perlu terus mengembangkan dirinya agar memiliki kecerdasan yang optimal. Dengan berbagai kecerdasan yang telah dijelaskan di atas, perempuan Indonesia tentu bisa mengetahui perannya di dalam memberikan pengaruh positif dan nyata, baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti anak-anak, suami, keluarga, tetangga, rekan kerja, dll. Oleh karena itu, para perempuan Indonesia harus memiliki dan mampu mengaplikasikan berbagai kecerdasan ini dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berbangsa dan bernegara, termasuk untuk terlibat dalam upaya menjaga ketahanan nasional dan keamanan lingkungannya.

Dalam hal ini, tentu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk membantu, memfasilitasi dan memperlengkapi para perempuan dengan kecerdasan-kecerdasan yang telah disebutkan di atas. Pemerintah bersama-sama dengan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha perlu terus memberikan pendampingan dan berbagai pelatihan kepada kelompok-kelompok perempuan dalam masyarakat mengenai bagaimana meningkatkan berbagai bidang kecerdasan. Perempuan yang semakin cerdas tentu akan mendukung dan berkontribusi positif dalam upaya ketahanan nasional.

Selain itu, ketika para perempuan telah memiliki dan mampu mengaplikasikan kecerdasan itu dalam konteks hidup bermasyarakat, maka mereka pun dapat mengkader para perempuan lainnya. Mereka menjadi teladan, contoh, sekaligus juga pembimbing bagi para perempuan di lingkungan mereka yang akan membawa semakin banyak perempuan Indonesia sadar dan memiliki keinginan untuk terlibat dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Dengan demikian, peranan perempuan dalam ketahanan nasional di Indonesia dan bahkan terlibat sebagai komponen cadangan dalam upaya bela negara dapat semakin terlihat nyata dan signifikan. Bahkan pada akhirnya perempuan menjadi salah satu komponen yang merupakan kekuatan bagi bangsa dan negara ini.

## **Kesimpulan**

Ketahanan nasional dalam bentuk usaha pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia tidak pernah membedakan gender. Sesuai konsitusi yang berlaku di Indonesia, setiap warga Negara,

baik itu laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Namun, untuk dapat berperan dalam upaya pertahanan dan keamanan di negara ini, perempuan Indonesia harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini terutama diperlukan oleh para perempuan untuk memahami dirinya, keadaan orang-orang di sekitarnya, kebutuhan lingkungan masyarakatnya, serta kondisi bangsa dan negaranya. Dengan demikian, kecerdasan ini menjadi bagian penting bagi perempuan untuk terlibat dalam upaya Ketahanan Nasional, yang dapat diwujudkan mulai dari lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal, sampai kepada bangsa dan Negara. Namun, tentu saja dibutuhkan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi para perempuan untuk dapat memiliki dan mengalikan kecerdasan yang dibutuhkan. Sehingga, mereka dapat berperan lebih banyak dalam upaya ketahanan nasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Frankern, Robert E., 2002. *Human Motivation*. 5<sup>th</sup> Edition, California: Wadsworth Group.
- Gardner, Howard, 1983. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Gunawan, Budi, 2006. *Terorisme: Mitos & Konspirasi*. Jakarta: Forum Media Utama.
- Joshua S. Goldstein, 2003. *International Relations*, Washington DC: American University.
- Latif, Asad-ul Iqbal, 2011. *Heart of Resilience: Singapore's Community Engagement Programme*. Singapore ISEAS & Ministry of Home Affairs, 2011.
- Luhulima, C.P.F, 2003. "Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara," dalam *Analisis CSIS: Terorisme dan Keamanan Manusia*. Jakarta: CSIS, No. 1, Tahun XXXII.
- Nainggolan, Poltak Partogi 2003. "Soft Issues sebagai Ancaman Keamanan Internasional," dalam *Analisis CSIS: Terorisme dan Keamanan Manusia*. Jakarta: CSIS, No. 1, Tahun XXXII.
- Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2012. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Solahudin, 2011. *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2012. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2011.
- The Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007*

### Website

- Buku Putih Pertahanan China tahun 1998 - 2010, Buku Putih ini dapat diakses dari [http://www.gov.cn/english/official/2005-08/17/content\\_24165.htm](http://www.gov.cn/english/official/2005-08/17/content_24165.htm).
- ITS Research, "Kondisi Geografis Indonesia", diakses dari <http://digili.its.ac.id>.
- Jumlah Penduduk Indonesia, Badan Pusat Statistik tahun 2010, dapat diakses dari [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&n\\_otab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&n_otab=1).
- Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, dapat diakses dari

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1).

Kusrahmadi, Sigit Dwi, “Ketahanan Nasional” Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dari <http://id.pdfsb.com/readonline/5a56524465774239586e5a3444583169566b593d-5259150>.

“Ledakan Bom di Jakarta Sejak Tahun 2000” diakses dari <http://www.kompas.com/lipsus072009/ledakanmegakuningan>.

Pidato Budi Susilo Soepandji, dalam acara Konsultasi Nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2012, berita dapat diakses dari <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/berita/178-umum/1713-komitmen-pemenuhan-hak-hak-konstitusional-bagi-perempuan.html>.

“Perempuan Indonesia Harus Cerdas,” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/05/m3jlle-linda-gumelar-perempuan-indonesia-harus-cerdas>

#### Artikel di koran

“Editorial: US Base? NIMBY,” *The Jakarta Post*, 18 November 2011.

- 
- <sup>i</sup> Sigit Dwi Kusrahmadi, “Ketahanan Nasional” Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dari <http://id.pdfsb.com/readonline/5a56524465774239586e5a3444583169566b593d-5259150>
- <sup>ii</sup> Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4.
- <sup>iii</sup> Robert E. Frankern, *Human Motivation*, 5<sup>th</sup> Edition, California: Wadsworth Group, 2002, pp. 314-316.
- <sup>iv</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- <sup>v</sup> Dari Buku Putih Pertahanan Chinatahun 1998 – 2010, Buku Putih ini dapat diakses dari [http://www.gov.cn/english/official/2005-08/17/content\\_24165.htm](http://www.gov.cn/english/official/2005-08/17/content_24165.htm)
- <sup>vi</sup> “Editorial: US Base? NIMBY,” *The Jakarta Post*, 18 November 2011.
- <sup>vii</sup> Joshua S. Goldstein, *International Relations*, Washington DC; American University, 2003, hal 92-94.
- <sup>viii</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 51-54.
- <sup>ix</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, dapat diakses dari [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=12&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1)
- <sup>x</sup> ITS Research, “Kondisi Geografis Indonesia”, diakses dari <http://digili.its.ac.id>
- <sup>xi</sup> Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia, dapat diakses dari [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1)
- <sup>xii</sup> Budi Gunawan, *Terorisme: Mitos & Konspirasi*, Jakarta: Forum Media Utama, 2006, pp. 114-116. Lihat juga “Ledakan Bom di Jakarta Sejak Tahun 2000” diakses dari <http://www.kompas.com/lipsus072009/ledakanmegakuningan>, dan Tjandra Dewi, “Jejak Peledakan Bom di

- 
- Indonesia (1998-2002)” diakses dari  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2002/10/21/LU/mbm.20021021.LU81897.id.html>
- <sup>xiii</sup> Salahudin, *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2011, hal 159-179.
- <sup>xiv</sup> C.P.F Luhulima, “Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara,” dan Poltak Partogi Nainggolan, “Soft Issues sebagai Ancaman Keamanan Internasional,” dalam *Analisis CSIS: Terorisme dan Keamanan Manusia*, Jakarta, CSIS, No. 1, Tahun XXXII/2003.
- <sup>xv</sup> Asad-ul Iqbal Latif, *Heart of Resilience: Singapore’s Community Engagement Programme*, Singapore: ISEAS & Ministry of Home Affairs, 2011.
- <sup>xvi</sup> Istilah ‘home-grown terrorists’ ini digunakan untuk menunjuk kepada para teroris yang berasal dari dalam negeri suatu Negara, baik itu yang merupakan warga Negara, maupun pendatang yang telah mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Secara jelas, *Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007* Amerika Serikat mendefinisikan ‘home-grown terrorists’ sebagai penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan yang direncanakan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang atau seseorang yang lahir, dibesarkan, memiliki basis dan beroperasi di dalam wilayah Amerika Serikat atau wilayah lainnya yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk mengintimidasi pemerintah, masyarakat dan penduduk AS atau sasaran sosial politik lainnya.
- <sup>xvii</sup> Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dalam acara Konsultasi Nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2012, berita dapat diakses dari <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/berita/178-umum/1713-komitmen-pemenuhan-hak-hak-konstitusional-bagi-perempuan.html>
- <sup>xviii</sup> “Perempuan Indonesia Harus Cerdas,” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/05/m3j1le-linda-gumelar-perempuan-indonesia-harus-cerdas>
- <sup>xix</sup> Howard Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*, New York: Basic Books, 1983.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia dan juga Program Manager di *Center for Security and Foreign Affairs Studies*, sebuah pusat kajian yang fokus pada isu-isu hubungan internasional dan kajian keamanan internasional. Paper ini adalah perbaikan dari presentasi yang disampaikan dalam program Penyuluhan - Green Kampong UKI, yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama para perempuan di sekitar Cawang, Jakarta Timur.